

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemberdayaan

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan dengan perolehan daya. Kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Robinson menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Iffeng mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment” yang berarti memberi daya, memberi “power”(kuasa), kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya.¹

Dari berbagai tulisan Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara

¹ Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk. *Model-model kesejahteraan sosial islam* (Yogyakarta: Fakultas dakwah, 2007), 118-119.

- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber daya manusia; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru, dan (6) pemerataan.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup : (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan “SDM” ; dan (3) peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.²

² Sumodiningrat Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial (Jakarta: Gramedia, 1999), 15

B. Proses Pemberdayaan

Pranarka dan vidhyandika menjelaskan bahwa : “proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan“. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan,kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.³

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan juga berarti kegiatan yang mensyaratkan adanya sebuah perubahan, yaitu perubahan kondisi seseorang, sekelompok orang, organisasi maupun komunitas menuju kondisi yang lebih baik. Disini kata pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat.

³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta; Bina Grafika,LPFE-UII,1985), 41.

Secara substansi, tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan mereka yang kurang beruntung atau yang tidak berdaya dapat menjadi berdaya, oleh karena itu melalui pemberdayaan diharapkan terjadi perubahan kondisi kearah yang lebih baik.⁴

Sumarjo menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu :

- a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi perubahan kedepan)
- b. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.
- c. Memiliki kekuatan untuk berunding.
- d. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
- e. Bertanggung jawab atas tindakanya.

Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.⁵

C. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Jamasy mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.⁶

⁴ Sinis Munandar, MS, *Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Keuangan Mikro, Badan Pengembangan SDM* (Jakarta : Departemen Pertanian, 2002), 86

⁵ Ibid, 57.

⁶ Ibid, 60.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, sulistyani menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.⁷

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumberdaya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan.

D. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Sehingga sebuah program pemberdayaan sosial perlu diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.

⁷ Ibid, 72.

Suatu perekonomian masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga keeksistensinya bersama bangsa dan negara.⁸

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Kedelapan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan mobilitas : kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil; kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu): kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo).
3. Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga; mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan

⁸ Nur Mahmudi Isma'il, "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat (Bandung: ISTECS, 2001)*, 28.

keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik; mengetahui nama seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki posisi tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.⁹

⁹ <http://e-learning.unej.ac.id/mod/resource/view.php?id=30650>. Diakses tgl 22-11-2014